

Membangun Profesionalisme Guru Berbasis Nilai Bahasa Santun, Bagi Pembinaan Kepribadian Bangsa yang Bijak

Oleh Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia

Guru professional adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Ciri utama *output* pendidikan umum yang tampak secara langsung adalah kemampuan manusia dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai nilai-nilai etika, agama dan social budaya masyarakat di lingkungannya, karena salah satu peran pendidikan adalah mewariskan dan memelihara kebudayaan (Arbi, 1991:71). Dalam kaitan berbahasa, maka *output* pendidikan umum adalah manusia yang mampu mengadopsi nilai sosial budaya masyarakat. Bahasa yang sopan adalah bahasa yang diungkapkan berdasarkan tatanan nilai budaya masyarakatnya. Pendidikan yang mengarahkan kepada perwujudan manusia terdidik yang mampu mengaktualisasikan tata nilai tersebut adalah pendidikan umum. Bahasa dalam kaitannya dengan pendidikan umum oleh Phenix (1964:61) dimasukkan ke dalam kategori makna simbolik (*symbolic meaning*)

Dengan menggunakan kata-kata yang bebas tanpa didasari oleh pertimbangan-pertimbangan moral, nilai, ataupun agama, akan melahirkan berbagai pertentangan dan perselisihan di masyarakat. Dahlan (2001:7) mensinyalir betapa banyak orang yang tersinggung oleh kata-kata yang tajam, apalagi dengan sikap agresivitasnya. Berbahasa tidak santun dapat melahirkan kesenjangan komunikasi sehingga menimbulkan situasi yang buruk dalam berbagai lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan Hawari (1999: 77) bahwa tawuran, penyalahgunaan obat terlarang, dan tindakan kriminal di kalangan remaja, disebabkan oleh tidak adanya komunikasi yang lebih baik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Konsep tersebut di atas sesuai dengan fenomena dalam pendidikan kita adalah terjadinya penurunan moral peserta didik dengan ditengarai sering terjadinya perkelahian antar siswa, pergaulan bebas, kasus narkoba, kebut-kebutan, geng motor, bermain di mall, pudarnya praktek sopan santun anak didik seperti mengucapkan kata-kata kotor, sikap kurang ramah terhadap guru. Hal tersebut juga berdampak terhadap kualitas SDM dan daya saing bangsa. Hal ini ditandai dengan *Human Development Index* (HDI) Indonesia, yang berada pada ranking 69 dari 104 negara, catatan UNDP pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 posisi Indonesia lebih merosot pada urutan ke-108 dari 177 negara. Menurut catatan UNDP tersebut Indonesia di posisi yang jauh lebih rendah dari pada Negara Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, bahkan Laos. Sementara *Global Competitiveness Indeks* tahun 2008 menurut Bank Dunia 2009, Indonesia berada di peringkat 54 dari 134 negara. Untuk wilayah Asia, Taiwan dan Singapore menempati urutan ke-5 dan 6. Sedangkan Jepang pada urutan ke-12. Sementara China dan India berada pada rangking 49 dan 50.

Dampak yang lebih luas lagi *output* pendidikan kita adalah munculnya oknum-oknum guru dan tenaga kependidikan yang berperilaku amoral. Laporan ICW (*Pikiran Rakyat*, 18/11/2006) ditemukan kasus yang sangat mencoreng dunia pendidikan, yaitu penyalahgunaan dana BOS yang disinyalir banyak “disunat” oleh para birokrat pendidikan (kepala sekolah dan

dinas pendidikan). Untuk itu arah dan praktek pendidikan nasional kita perlu dikaji ulang untuk perbaikannya.

Salah satu factor yang perlu dikaji adalah profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya, karena kualitas pendidikan suatu bangsa itu bergantung pada kualitas gurunya dan kualitas guru ditentukan oleh keinginan para guru itu sendiri dalam meningkatkan kualitasnya (Rizali, *et al*, 2009:3). Pendidikan yang unggul tidak lepas dari peran guru yang unggul pula, sehingga menghargai sekaligus memberdayakan guru dalam konteks reformasi pendidikan adalah wajib hukumnya. Sebab, profesionalisme guru merupakan hal yang paling utama bagi keberhasilan suatu sistem pendidikan (Barizi, 2009:137)

Selain profesionalisme guru, factor lain yang perlu dikaji ulang adalah profesionalisme pengelola pendidikan, karena sekolah merupakan institusi di mana pendidikan berlangsung. Pendidikan adalah proses belajar mengajar atau proses komunikasi edukatif antara guru dan murid. Dilihat dari pandangan sosial, sekolah merupakan institusi sosial yang tidak berdiri sendiri. Sebagai institusi sosial, sekolah berada dalam lingkungan institusi sosial lainnya dalam masyarakat. Sekolah bukanlah tempat yang steril dari pengaruh luar. Siswa datang dari keluarga dan masyarakat yang berbeda-beda, oleh karena itu sekolah tidak bisa dipisahkan dari masyarakatnya. Bahkan lebih dari itu, sekolah merupakan gambaran atau miniatur dari masyarakat lingkungannya.

Sebagai institusi sosial, sekolah memiliki peranan dan fungsi tersendiri. Sekolah berperan membimbing, dan mengarahkan siswa untuk mengenal, memahami, dan mengaktualisasikan pola hidup yang berlaku dalam masyarakat. Orang-orang yang baik di tengah masyarakat merupakan figur yang diidolakan untuk dicontoh siswa. Nilai moral dan etika kesopanan menjadi acuan untuk dapat dilakukan siswa, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Dengan demikian, sekolah pada hakikatnya adalah institusi yang mewariskan dan melestarikan nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat.

Peranan sekolah tidak berhenti pada pewarisan dan pelestarian nilai saja, tetapi juga menjadi lokomotif atau agen pembaharuan masyarakat, karena bagaimanapun sekolah merupakan tempat dilangsungkannya proses pembinaan manusia yang akan mengisi masa depan masyarakat. Kondisi di masa depan berbeda dengan kondisi dan situasi hari ini. Karena itu, orientasi sekolah adalah orientasi ke masa depan dengan segala perangkat sistem yang harus dimilikinya. Proses pembelajaran tidak berhenti pada penyampaian materi kurikulum, tetapi pengembangan dan reproduksi budaya serta kebiasaan baru yang lebih unggul pun seyogianya dilakukan.

Misi sekolah dalam pembinaan berbahasa santun tidak lagi dilakukan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi masyarakat pun perlu menyediakan suasana yang kondusif yang menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sekolah menjadi motor penggerak menuju ke arah perubahan dan masyarakat menyediakan gerbong yang sejalan dengan penggerakannya. Adapun guru profesional merupakan sosok sumber daya insani yang dapat menjadi “nakhoda” agar peran sekolah dan masyarakat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk menciptakan profesional guru dan professional pengelola satuan pendidikan maka perlu adanya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang professional pula, sehingga mampu mencetak calon-calon guru dan pengelola satuan pendidikan yang professional. Selanjutnya mereka yang diamanahi menjadi profesional itu, merupakan sebuah keniscayaan dan menjadikan visi transendental yang berbasis kepada seperangkat nilai (khususnya nilai agama) adalah sesuatu yang masuk kategori “stadium 4” bagi praktek pendidikan nasional dewasa ini. Oleh karenanya, kompetensi dalam bidang pendidikan nilai, khususnya nilai bahasa santun, harus menjadi bagian integral bagi setiap lulusan calon guru dan guru yang sudah bekerja pada setiap satuan pendidikan, sehingga mata pelajaran apapun yang ia ampu dapat memberikan kontribusi langsung bagi pembentukan generasi bangsa dengan karakter sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Di sisi lain, krisis moral dan akhlak generasi bangsa yang kini kian mengkhawatirkan serta semakin tidak menjanjikannya daya saing global bangsa Indonesia dapat segera teratasi melalui gerakan kolektif dari semua guru profesional yang berbasis pendidikan nilai bahasa santun.

Profesionalisme guru yang perlu dibangun oleh LPTK adalah guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP No 74 tahun 2008 tentang guru pasal 3 ayat 2 serta Permendiknas No 16 tahun 2007. Disamping itu LPTK diharapkan mampu membentuk seorang guru yang memiliki kriteria profesi guru sebagai panggilan hidup yang sepenuh waktu, pengetahuan dan kecakapan, kebakuan yang universal, pengabdian, kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif, otonomi, kode etik, dan klien, Mukhtar Lutfi (2009: 140-141). Dan dalam perspektif pendidikan Islam, Khalifah dan Quthub (2009:40-41) mengungkapkan tentang karakter guru muslim sebagai berikut: (1) Ruhiah dan akhlakiah, (2) Asas dan penopang Anda dalam mengajar adalah untuk menyebarkan ilmu dan demi merengkuh pahala akhirat, (3) Tidak emosional, (4) Rasional, (5) Sosial, (6) Fisik yang sehat, dan (7) Profesi.

Sementara Barizi (2009:135) mengungkapkan bahwa hendaknya seorang guru profesional memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Komitmen terhadap profesionalitas, (2) Menguasai ilmu dan mau mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, baik secara teoretis maupun praktis (*transformation of knowledge*, internalisasi, dan implementasi), (3) Mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, mengatur, dan memelihara kreasi itu bagi kemanfaatan diri, masyarakat, dan alam sekitarnya, (4) Mampu menjadikan dirinya sebagai model, pusat anutan/teladan, dan konsultan bagi peserta didik, (5) Mampu bertanggung jawab dalam membangun peradaban di masa depan

Dan menurut pandangan Sauri, LPTK harus mampu membangun seorang guru yang memiliki kinerja profesional seperti (1) Kekuatan visi, (2) Kekuatan ilmu, (3) Kekuatan pedagogic, (4) Kekuatan Kepribadian, (5) Kekuatan kompetensi pendidikan nilai, dan (6) Menjadikan Allah Swt. sebagai Maha Guru dan Muhammad sebagai Model Guru Sejati.

Sementara Dahlan (2001: 9) menegaskan bahwa Al-Quran menampilkan enam prinsip berbahasa santun yang seyogianya dijadikan pegangan bagi para guru profesional saat berbicara dihadapan para peserta didiknya, antara lain (1) *Qaulan sadida*, (2) *Qaulan ma'rufa*, (3) *Qaulan baligha*, (4) *Qaulan maysura*, (5) *Qaulan layyina*, dan (6) *Qaulan karima*.

Dengan konsep ini maka diharapkan pencapaian tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, atau dalam istilah saya disebut dengan insan yang *cerdas otaknya, lembut hatinya dan terampil tangannya*, dapat terwujud.

KERANGKA BERPIKIR

